

**PERILAKU KOMUNIKASI
KOMUNITAS LESBI DI MAKASSAR**

OLEH:

SARTIKA MARHAN

E 311 07 002



*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Jurusan Ilmu Komunikasi Program Studi Jurnalistik*

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2011

ABSTRAK

Hartini Dewi. *Aktivitas Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Kesehatan Gratis Di Sulawesi Selatan. (Dibimbing oleh Abdul Gafar dan Aswar Hasan).*

Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui aktivitas Humas Dinas Kesehatan dalam mensosialisasikan Program kesehatan Gratis di Sulawesi Selatan; (2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat aktivitas Humas Dalam Mensosialisasikan Program Kesehatan gratis.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi tolak ukur informan dalam penelitian ini adalah Humas di jajaran kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Data primer dikumpulkan dengan observasi dan wawancara langsung. Data sekunder diperoleh melalui media literatur seperti buku dan internet. Selanjutnya data data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas Humas Dinas Kesehatan dalam Mensosialisasikan Program Kesehatan gratis, dilakukan melalui empat proses tahapan kerja Humas yaitu penemuan fakta, perencanaan, komunikasi dan evaluasi. Aktivitas Humas didukung oleh sarana dan prasarana serta kerjasama yang baik antara Humas dan seksi seksi yang ada pada Dinas Kesehatan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kondisi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda sehingga pemahaman masyarakat berbeda mengenai program kesehatan gratis, faktor penghambat lainnya yaitu pendidikan yang dimiliki oleh Humas Dinas Kesehatan tidak relevan dengan tugas dan fungsi kehumasan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai makhluk sosial, komunikasi tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia pada umumnya. Kita dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan orang lain, menjadikan manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang akhirnya akan mengerti dan memahami pesan yang telah disampaikan agar dapat menghasilkan feedback, yaitu adanya interaksi.

Kegiatan Hubungan Masyarakat pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi. Berbeda dengan komunikasi yang lainnya, aktivitas Hubungan masyarakat adalah melakukan komunikasi timbal balik (*Two Way Communication*) antara lembaga atau unit kerja dengan pihak publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya suatu tujuan serta membangun opini publik.

Sebagai sarana atau alat dari komunikasi sosial, kita mengenal adanya suatu badan atau unit di dalam instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta yang lazim diberi nama Hubungan Masyarakat sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *Public Relations*.

Adanya unit kehumasan pada setiap lembaga, organisasi atau perusahaan merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka penyebaran aktivitas instansi secara internal dan eksternal. Hubungan masyarakat merupakan suatu cara untuk memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran informasi melalui media.

Ada perbedaan utama antara fungsi dan tugas Humas yang terdapat di instansi pemerintah dan lembaga nonpemerintah. Pada instansi pemerintah tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi terjadi, baik berbentuk produk barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada publik secara komersil. Tetapi tugas Humas instansi pemerintah melaksanakan kegiatan seperti: kampanye publikasi, promosi pemasaran dan periklanan yang lebih menekankan pada bentuk *public services* atau *public utilities* demi kepentingan pelayanan umum/masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan saat ini, semakin disadari betapa pentingnya peranan Humas sehingga boleh dikatakan tidak ada instansi pemerintah yang besar tidak memiliki bagian Hubungan Masyarakat dalam struktur organisasinya. Sebab suksesnya tugas dan program pemerintah saat ini tidak hanya ditentukan oleh tercapainya program yang telah ditetapkan, tetapi juga ditentukan oleh faktor seberapa jauh masyarakat mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas dan program pemerintah tersebut dan ikut serta dalam pelaksanaannya.

Keberadaan Humas di suatu lembaga atau instansi pemerintahan merupakan keharusan, baik secara fungsional maupun operasional. Departemen kehumasan harus mampu bertindak sebagai *public information*, *public affair* dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan kegiatan dan program kerja pembangunan pada suatu instansi baik ditujukan kepada publik internal maupun publik eksternal (masyarakat).

Peranan Humas pemerintah dapat merupakan bagian dari suatu alat atau saluran instansi pemerintah, yaitu dengan memperlancar proses interaksi positif dan menyebarluaskan informasi mengenai publikasi pembangunan nasional, daerah dan provinsi melalui kerja sama dengan pihak media massa/pers.

Melalui unit atau program kerja Humas, pemerintah dapat melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai kebijaksanaan atau tindakan tertentu serta kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas dinas pemerintah. Menurut John D. Millet dalam bukunya *Management in Public Services the Quest for effective performance* dalam Ruslan (2008:107), peran Humas/PR lembaga Pemerintahan dalam melaksanakan tugas atau kewajiban utamanya yaitu :

1. Mengamati dan mempelajari keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat
2. Kegiatan untuk memberikan nasehat atau sumbang saran dalam menanggapi apa yang sebaiknya dapat dilakukan lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh publiknya

3. Kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan baik antara publik dengan para pejabat pemerintah.
4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh pemerintah.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya

Dalam rangka menjamin akses penduduk Sulawesi Selatan terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 tahun 2008, maka sejak awal agenda 101 hari pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Selatan berupaya untuk mengatasi hambatan dan kendala melalui pelaksanaan kebijakan Program Pelayanan kesehatan Gratis. Program ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan selanjutnya jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi teknis yang ditugaskan dan diberi tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya dengan jalan memberikan keringanan kepada penduduk di Sulawesi Selatan dalam hal biaya mengatasi masalah kesehatannya dengan melakukan pembebasan pelayanan kesehatan dasar sampai rawat inap kelas III di semua unit pelayanan kesehatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melalui kebijakan ini maka diharapkan tidak ada lagi masyarakat di Sulawesi Selatan yang tidak dapat mengatasi masalah kesehatannya karena alasan ekonomi atau tidak punya biaya.

Program kesehatan Gratis dilaksanakan mulai 1 Juli 2008, sesuai PERGUB No. 13 Tahun 2008 dengan 3 tahapan pelaksanaan, yaitu : pertama tahap uji coba 2008 sampai dengan 2009, kedua tahap pematapan 2010 sampai dengan 2011, ketiga Tahap pengembangan 2012 sampai dengan 2013. Program, ini bertujuan untuk meningkatkan akses, pemerataan & kualitas pelayanan kesehatan terhadap seluruh penduduk Sulawesi Selatan guna tercapainya derajat kesehatan yang optimal, efektif dan efisien.

Namun dalam pelaksanaan Program Kesehatan Gratis di Sulawesi Selatan terdapat berbagai kendala dalam realisasinya, salah satunya yaitu masih banyak masyarakat Sulawesi Selatan yang tidak mengetahui serta kurangnya pemahaman tentang kebijakan ini, masih banyak masyarakat yang belum memahami batasan batasan yang digratiskan sesuai petunjuk teknis program Kesehatan Gratis. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai pelayanan kesehatan Gratis.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi teknis terus melakukan evaluasi dan pembenahan untuk kemantapan dan kelangsungan program ini termasuk kinerja dari Tim 9 yang selama ini dibentuk untuk kelancaran pemantauan dan pelaksanaan program ini di lapangan, termasuk kegiatan *monitoring* dan sosialisasinya.

Untuk mencapai suksesnya Pelaksanaan program pelayanan kesehatan Gratis maka Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan perlu menyebarluaskan/mensosialisasikan kebijakan Kesehatan Gratis kepada masyarakat agar dapat dilakukan secara terpadu, terintegrasi melalui sistem yang jelas dan tepat sasaran. Sebab suksesnya suatu program pemerintah kini tidak hanya ditentukan oleh tercapainya program yang telah ditetapkan, tetapi juga ditentukan oleh seberapa jauh masyarakat mengetahui perkembangan pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut upaya Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan sosialisasi Program Kesehatan Gratis dengan melakukan penelitian berjudul :

**“ AKTIVITAS HUMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM
KESEHATAN GRATIS DI SULAWESI SELATAN ”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana aktivitas Humas Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mensosialisasikan program Kesehatan Gratis di Sulawesi Selatan?
2. Faktor faktor apa yang mendukung dan menghambat aktivitas Humas dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mensosialisasikan program Kesehatan gratis di Sulawesi Selatan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

- a.) Untuk mengetahui akitvitas Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mensosialisasikan program Kesehatan Gratis di Sulawesi Selatan.
- b.) Untuk mengetahui faktor faktor yang mendukung dan menghambat akitvitas Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mensosialisasikan program Kesehatan Gratis di Sulawesi Selatan.

2. Kegunaan penelitian

- a.) Kegunaan Secara Teoritis sebagai bahan masukan bagi pengembangan disiplin ilmu komunikasi khususnya dalam bidang Hubungan Masyarakat.
- b.) Kegunaan secara Praktis sebagai bahan masukan Humas Pemerintah dalam mengemban tugas, terutama dalam menilai kinerja dalam melakukan kegiatan kegiatan Komunikasi.

D. KERANGKA KONSEP

Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pelayanan kesehatan untuk dapat hidup layak dan sejahtera. Untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melakukan kebijakan melalui Program Kesehatan Gratis. Diharapkan program ini dapat mengatasi kendala yang ada untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan program Kesehatan Gratis, Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berperan serta dalam mensosialisasikan kebijakan ini.

Unit kehumasan dalam sebuah lembaga atau instansi pemerintah merupakan keharusan fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan suatu program atau kebijakan lembaga atau instansi pemerintah. Humas dapat merupakan alat atau saluran untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi melalui kerja sama dengan pihak pers, media cetak dan elektronik.

Definisi PR/Humas menurut Dr. Rex Harlow dalam Ruslan (2010:16) menyatakan bahwa “ PR/humas adalah fungsi manajemen yang khas mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama, melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan/permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menanggapi opini publik ”.

Humas merupakan fungsi manajemen untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi hasil apa yang di peroleh. Selain itu Humas juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara publik luar dan pihak lembaga. Humas tidak hanya bertugas sebagai komunikator dari pihak lembaga/instansi kepada publiknya, melainkan juga merupakan saluran informasi dari publik kepada perusahaan/instansi.

Fungsi Humas dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik dua arah antara perusahaan/instansi yang diwakilinya dengan publik sebagai sasaran pada akhirnya dapat menentukan sukses atau tidaknya tujuan dan citra yang hendak di capai oleh perusahaan/instansi.

Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas Humas yang terdapat dalam instansi pemerintah dengan nonpemerintah adalah tidak adanya unsur unsur komersial walaupun Humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi, periklanan. Melalui unit atau program kerja Humas, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas tugas atau kewajiban kewajiban ke pemerintahannya.

Menurut Dimock dan Koeing dalam Ruslan (2010:342), pada umumnya tugas tugas dari Humas pemerintah yaitu ;

- Berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut.
- Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta dalam pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang.
- Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparat pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas serta kewajiban masing masing.

Secara garis besar, Humas Pemerintah memiliki peran ganda. Fungsi keluar adalah upaya memberikan informasi atau pesan pesan sesuai dengan kebijaksanaan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat sebagai khalayak sasaran. Fungsi ke dalam adalah pihak humas wajib menyerap aspirasi atau keinginan publik/masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan bagi instansi demi tercapainya tujuan bersama.

Untuk mencapai sasaran dengan baik, seorang Humas dalam melaksanakan aktivitasnya guna mensosialisasikan programnya, haruslah memahami strategi komunikasi, demikian pula harus memahami secara terperinci tentang program yang akan disosialisasikan dan kondisi masyarakat.

Tujuan dari proses perencanaan program kerja untuk mengelola berbagai aktivitas Humas tersebut diwujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui manajemen Humas yang dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan hasil atau sasarannya, kemudian adanya pertukaran pendapat, pesan, dan informasi yang jelas serta mudah dimengerti oleh kedua belah pihak komunikator dan komunikan yang terlibat.

Menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center dalam Ardianto (2009:164), mengatakan bahwa proses perencanaan program kerja melalui “Empat proses tahapan atau langkah langkah pokok” yang menjadi landasan acuan pelaksanaan program kerja kehumasan, yaitu

1. ***Fact Finding*** (penemuan fakta)

Pada tahap ini, penelitian yang dilakukan berkaitan dengan opini, sikap dan reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan kebijaksanaan kebijaksanaan suatu organisasi. Setelah itu baru dilakukan pengevaluasian fakta dan informasi yang masuk untuk menentukan keputusan berikutnya. Pada tahap ini akan ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan organisasi.

2. ***Planning*** (perencanaan)

Dalam tahap ini sikap, opini, ide ide, dan reaksi yang berkaitan dengan kebijaksanaan serta penetapan program kerja organisasi yang sejalan dengan keinginan pihak yang berkepentingan mulai diberikan.

3. ***Communication*** (komunikasi)

Pada tahap ini merupakan proses dimana Humas mengkomunikasikan program program yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pelaksanaan program, keterampilan berkomunikasi adalah kunci keberhasilan bagi seorang Humas. Kemampuan menggunakan media komunikasi sangat penting sebab komunikasi memainkan peranan penting dalam memelihara citra organisasi/lembaga di kalangan anggota masyarakat. Komunikasi juga merupakan asas pembentukan opini publik.

4. ***Evaluations*** (evaluasi)

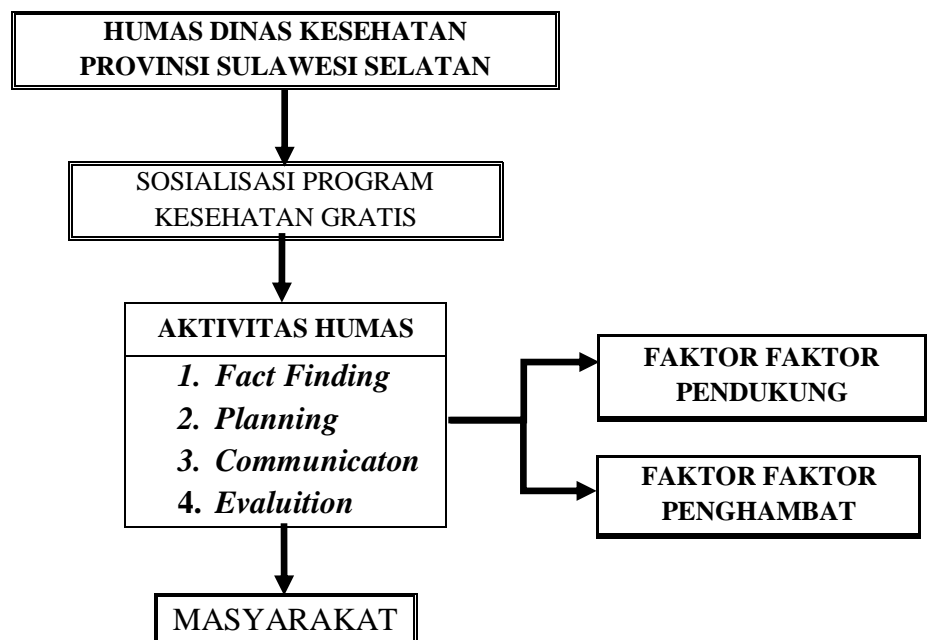
Untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai dari program yang telah dilaksanakan. Evaluasi Humas bertujuan untuk menentukan faktor faktor yang menjadikan kegagalan atau keberhasilan suatu program serta mengukur apakah program yang telah dilaksanakan berhasil mencapai tujuan. Evaluasi adalah suatu tahap yang sangat penting untuk mencapai praktek kehumasan yang efektif

Bagi Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu tugas yang diembannya adalah bagaimana melakukan aktivitas komunikasi dalam usaha mensosialisasikan program Kesehata Gratis. Dalam kegiatannya seorang Humas harus melaksanakan tugas melalui pendekatan informatif, edukatif, dan persuasif serta melakukan proses komunikasi secara terencana dan terus menerus yang meliputi keterampilan berkomunikasi, pesan yang disampaikan akurat, objektif

dan punya daya pengaruh yang kuat guna berhasilnya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Efektivitas Humas akan terlihat dari hasil yang dicapai dari kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh humas, praktik kehumasan harus tetap berpedoman pada asas dan prinsip prinsip kehumasan serta berpedoman pada kode etik kehumasan. Praktek kehumasan yang efektif diharapkan dapat mempengaruhi opini publik tentang instansi pemerintah yang diwakilinya karena opini publik menentukan citra lembaga di masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dan penafsiran serta memudahkan pemahaman tentang konsep konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan batasan istilah yang berhubungan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Hubungan masyarakat

Hubungan masyarakat (Humas) adalah suatu fungsi manajemen yang berperan menjaga hubungan baik, memberikan pemahaman kepada publik, menyampaikan pesan/informasi, serta publikasi dengan cara komunikasi timbal balik atau komunikasi dua arah antara instansi dengan publiknya.

2. Aktivitas Humas

Tahapan kerja yang dilakukan oleh Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi selatan dalam upaya mensosialisasikan Program Kesehatan gratis. Meliputi penemuan fakta, perencanaan, Komunikasi, evaluasi.

3. Humas Dinas Kesehatan

Humas Dinas kesehatan yang dimaksud adalah bagian yang termasuk dalam susunan organisasi dan tugas pokok Dinas yang berada dalam tugas dan fungsi dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Prov Sulawesi Selatan.

4. Program Kesehatan Gratis

Program Kesehatan Gratis adalah program yang merupakan kebijakan pemerintah Sulsel dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Sulawesi Selatan. Dan program ini juga merupakan

program pembangunan yang dicanangkan Gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2008 sampai dengan 2013.

5. Sosialisasi

Sosialisasi adalah kegiatan memperkenalkan, menyebarluaskan serta memberikan pemahaman mengenai program Kesehatan Gratis.

F. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bagian Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini berlangsung selama \pm 2 bulan, yaitu pada bulan September 2011 sampai dengan November 2011.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian untuk menggambarkan atau penjabaran tentang suatu masalah penelitian berdasarkan karakteristik yang dimiliki, menggambarkan data sekunder dan data primer yang bersumber dari lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

- Data Primer, diperoleh melalui penelitian langsung terhadap objek penelitian untuk mencari informasi atau data dengan cara mengadakan
 - a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap kegiatan Humas Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Interview/Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara secara langsung kepada pihak

yang dianggap dapat memberi informasi dan berkompeten sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

- Data Sekunder, melalui studi pustaka, mencari rujukan teoretis yang relevan dengan cara membaca buku, surat kabar, majalah, hasil penelitian, bahan kuliah maupun browsing internet yang sesuai dengan kajian penelitian.

4. Informan

Untuk mengetahui aktivitas Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mensosialisasikan program Kesehatan Gratis, maka penulis menentukan narasumber atau informan yang dianggap memahami permasalahan yang sedang diteliti, informan dalam penelitian ini adalah :

1. Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tim Kesehatan Gratis (Tim 9)

Informan dalam penelitian ini adalah yang melakukan fungsi kehumasan dari setiap bidang yang ada pada Dinas Kesehatan Prov. Sulsel dan merupakan anggota dari kelompok kerja tim 9 Kesehatan Gratis

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggunakan fakta (menguraikan data dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian), baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan judul Aktivitas Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Kesehatan Gratis Di Sulawesi Selatan, maka Penulis menyimpulkan bahwa :

1. Aktivitas Humas Dinas Kesehatan dalam mensosialisasikan Program Kesehatan Gratis dilakukan melalui empat proses tahapan kerja Humas yaitu penemuan fakta (*Fact Finding*), perencanaan (*planning*), komunikasi (*communications*), dan Evaluasi.

Pada tahap perencanaan humas dinas kesehatan bekerja sama dengan seksi pembiayaan dan jaminan kesehatan melakukan suatu penemuan fakta melalui identifikasi masalah dan investigasi di lapangan.

Selanjutnya Humas Dinas Kesehatan menyusun perencanaan program kerja yang akan dilaksanakan berdasarkan data dan fakta yang telah diperoleh sebelumnya.

Setelah melakukan perencanaan program kerja, Humas Dan Tim kesehatan Gratis mengkomunikasikan program kerja yang telah disusun sebelumnya. Dan pada tahap akhir dari proses tahapan kerja Humas dinas kesehatan adalah melakukan evaluasi, sejauh mana keberhasilan sosialisasi program kesehatan Gratis yang telah dilakukan.

2. Faktor pendukung aktivitas Humas dinas kesehatan gratis dalam mensosialisasikan program kesehatan Gratis yaitu adanya kerja sama yang baik dengan seksi-seksi lainnya, serta didukung oleh seluruh sarana dan prasarana yang ada pada dinas kesehatan, dikarenakan oleh komitmen yang besar dari kepala Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Selatan untuk kesuksesan program kesehatan Gratis khususnya dalam kegiatan sosialisasinya kepada masyarakat.

Adapun faktor penghambat aktivitas humas dalam mensosialisasikan program kesehatan gratis adalah keberadaan Humas Dinas Kesehatan yang kurang memiliki keterampilan dan keahlian dibidang kehumasan dikarenakan oleh pendidikan yang dimiliki oleh Humas Dinas Kesehatan tidak relevan dengan tugas Humas pada umumnya. Sehingga menjadi suatu kendala dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Sedangkan faktor penghambat yang sangat mendasar dalam mensosialisasikan Program Kesehatan Gratis adalah pemahaman masyarakat Sulawesi Selatan yang berbeda-beda mengenai konsep Gratis terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang ada.

B. SARAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dipandang perlu mengajukan saran saran sebagai berikut :

1. Dalam mensosialisasikan program kesehatan Gratis kepada masyarakat diharapkan agar lebih memperhatikan masalah masalah yang ada di lapangan khususnya mengenai keadaan masyarakat, perlu diketahui apakah informasi yang disampaikan telah diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena tujuan dilakukannya sosialisasi adalah untuk memberikan informasi agar masyarakat mengerti dan paham mengenai program kesehatan Gratis serta dapat berpartisipasi.
2. Fakta bahwa Humas Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki pendidikan yang relevan dengan tugas dan fungsi kehumasan maka disaran agar Humas Dinas Kesehatan mengikuti pendidikan dan pelatihan kehumasan agar dapat meningkatkan keterampilan khusus mengenai tugas dan fungsi humas serta menambah wawasan berfikir sebagai seorang Humas.